

Nick. T. Wiratmoko

## Wacana Kuasa : Negara, Pasar, Komunitas Politik, dan *Civil Society*

Alkisah, kekuasaan pada gilirannya dimaknakan berasal dari atas atau berasal dari pusat dan bermuara ke aras bawah atau ke pinggiran. Kekuasaan dalam banyak hal dibela, diperkokoh, distabilkan, dan jika perlu harus membawa tumbal terhadap orang yang dikuasai atau yang dianggap sebagai ancaman terhadap tegaknya kekuasaan tersebut. Kuasa dalam hubungan dengan pasar, *civil society*, komunitas politik, menjadi sangat menarik diwacanakan karena ternyata pada masing-masing ranah (*domain*) tersebut terjadi tarik-menarik, kong-kalikong, dan bila perlu kekuasaan yang memusat harus dibela dengan rezim yang korup. Kekuasaan juga kemudian mengambil beragam pola dalam membujuk pengikut, bawahan, komunitas subordinat, komunitas marginal. Dominan kekuasaan ada yang dihadirkan dengan wajah yang otoriter represif, hegemonik, bahkan yang bernuansakan kemasan demokrasi.

Apakah substansi kekuasaan memang selalu berasal dari atas dan dari pusat? Ternyata dalam banyak peristiwa pertanyaan di atas bisa dijawab ya dan tidak. Jawaban ya mengasumsikan bahwa tradisi kekuasaan yang mengedepankan paradigma modernitas suka atau tidak memang mengandalkan pola kekuasaan yang berasal dari atas, berbasis birokrasi, sangat hierarkis. Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan misalnya, diusung dengan logika kekuasaan yang berasal dari atas. Perumusan kebijakan pembangunan harus dikembangkan melalui paradigma top-down. Tidak ada partisipasi kecuali mobilisasi dalam perumusan program pembangunan. Musyawarah pembangunan desa/kelurahan pada akhirnya secara dini sudah memarginalkan peran *civil society*. Artinya, pusat kebenaran dan pusat moral pembangunan bukan berasal dari *civil society*, tetapi berpusat pada negara. Dalam posisi negara yang sangat kuat ini, walaupun toh ada resistensi maka yang muncul adalah sebuah perlawanan sehari-hari dari komunitas yang lemah dengan mengandalkan apa yang disebut James Scott sebagai *weapons of the weak*. Aparat negara pada aras desa pun dapat mengaktualisasikan kekuasaannya dengan mengembangkan pola patronase dan memandulkan tradisi partisipatoris komunitas warganya. Bahkan dalam pemilihan umum jika perlu mengedepankan intimidasi dan premanisme.

Jawaban tidak diberikan ketika ternyata dalam beberapa hal ternyata arena kekuasaan justru menjadi arena dominasi yang merepresentasikan otoritas rakyat. Rakyat dalam asumsi ini digambarkan begitu sangat berdaya, kritis, memiliki *bargaining position* yang begitu kuat terhadap negara maupun pasar. Rakyat dalam posisi seperti ini dapat dikonstruksikan melalui suatu pendampingan ataupun tanpa pendampingan. Dalam komunitas rakyat sosok intelektual organik selalu hadir sebagai sebuah spirit pergerakan memprotes ketidakadilan. Organisasi rakyat seperti *civil society organization (CSO/LSM)* inilah yang kemudian menjadi tulang punggung

pemberdayaan rakyat marginal. Advokasi yang dimaksud bukan hanya sebatas tindakan litigasi, tetapi juga membantu dalam membangun proses penyadaran. Di luar komunitas ini, dengan meminjam istilah dalam teori *postkolonial*, peran peneliti sebagai *agencies*, menjadi sangat signifikan ketika wacana pengetahuan yang dihadirkan selama ini didominasi oleh rezim penguasa yang dominan sementara membiarkan dan tidak mengartikulasikan komunitas yang diam, *subaltern*, dan *voiceless*. Itulah sebabnya bahwa dalam kajian tulisan yang disajikan dalam Jurnal *Rena* kali ini juga tidak luput dari peran para *agencies* yang mencoba mengartikulasikan agenda-agenda remeh-temeh pada aras lokal. Dengan demikian jika selama ini rasionalitas kaum *voiceless* tidak banyak muncul ke permukaan wacana, kinilah saatnya agenda dialektika antara yang dominan dan minoritas diupayakan untuk disajikan sebagai dialektika yang kaya dan sekaligus tidak terduga.

Kendati sejumlah tulisan disajikan secara terpisah-pisah dalam batas rubrikasi, harus diakui bahwa kontribusi penelitian dalam kegiatan untuk advokasi/pendampingan menjadi sebuah hal yang sangat berguna bagi pertimbangan perumusan kebijakan publik baik desa maupun pada aras kota. Dalam kontribusi tulisan dalam edisi *Rena* kali ini nampak adanya ragam kekuasaan, baik yang berasal dari bawah maupun yang berasal dari atas. Praktik kekuasaan yang saling memanfaatkan, mendominasi, merepresi, bahkan mengalienasikan, begitu kental dalam kehidupan sehari-hari *civil society*, komunitas pasar, komunitas politik, dan negara. Alhasil, jalinan adu kuat dan adu pintar pada akhirnya menjadi sebuah wacana yang tidak terelakkan.

Ben White dan Gutomo Bayu Aji mengisi rubrik artikel utama dengan *The Changing Character of Local Politics: Notes on a Village in Yogyakarta from Independence to Reformasi*. Tulisan ini mencoba menyajikan bagaimana perjalanan sejarah lima pedusunan menjadi sebuah desa bernama KL dengan membagi pemaparannya ke dalam lima periodisasi. Sorotan tulisan ini berkaitan dengan perubahan relasi karakter pemimpin desa dan komunitasnya. Pasang-surut tradisi patronase, pengendalian partisipasi politik rakyat, dominasi elite desa terhadap rakyat menjadi bahasan artikel ini.

Dalam rubrik laporan penelitian diketengahkan tiga sajian artikel. *Pertama*, tulisan Nico L. Kana berjudul *Dinamika Politik Pembangunan di Aras Lokal: Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Perkotaan di Kota Salatiga*. Tulisan ini mencoba menguraikan perjalanan keterlibatan masyarakat bersama-sama dengan apparatus negara merumuskan kebijakan publik di bidang penyediaan air bersih. Dengan menggunakan sebuah metode pengukuran partisipasi, penulis menyoroti seberapa jauh skala partisipasi telah dipenuhi oleh komunitas konsumen atau komunitas *stakeholder* air bersih. *Kedua*, tulisan Gregorius Sahdan, *Modernisasi Ekonomi Politik Pedesaan*. Dalam tulisan ini menulis hendak memaparkan suatu potret buram bagaimana desa diintervensi oleh negara, komunitas *civil society* seperti halnya komunitas petani harus ditundukkan dengan pola korporatisme, kebijakan politik pangan yang justru memarginalkan petani, yang kesemuanya itu digelindingkan dengan mengatasnamakan modernisasi. Dan, *ketiga*, tulisan Zully Qodir yang mengambil judul, *Respons Masyarakat Islam atas Perubahan: Studi atas Gerakan Pemikiran Islam Liberal di Indonesia*. Gerakan pemikiran Islam liberal di Indonesia muncul di tengah-tengah stagnasi pemikiran Islam yang dipandang sudah *taken for granted*, beku, statis, dan sakral. Sementara, kehadiran gerakan pemikiran Islam liberal sendiri memahami bahwa kehidupan berbasis Islam hanya mungkin berialan ketika konsep keagamaan itu mendapatkan pemaknaan

karena selain mendapat tantangan dari komunitas Islam yang konservatif, gerakan ini memerlukan sebuah orientasi pemikiran yang tidak semata terjebak pada pemikiran Islam Liberal Timur Tengah.

Sementara itu, rubrik komentar penelitian mengangkat sebuah publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Jan Breman dan Gunawan Wiradi yang berjudul *Good Times in Rural Java*. Nico L. Kana mencoba membuat beberapa komentar. Komentar tersebut di antaranya adalah bahwa kebijakan negara atas desa ternyata telah melahirkan sebuah kebijakan yang bias urban. Selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan, dengan modal penelitian berbasis penelitian longitudinal maka akan diperoleh kedalaman dalam pemaknaan penelitian, sejarah krismon se berulang dalam dua desa yang diteliti, aspek dinamika-proses-relasi pada prinsipnya lemah dan mengungkap studi makro aras regional dan nasional.

Sedangkan rubrik wawancara dengan ahli menengahkan wawancara dengan pemerhati di bidang advokasi pada komunitas miskin kota dan pemerhati dinamika politik pada aras desa. Mereka masing-masing adalah Ida Budiati dan Kutut Suwondo. Wawancara dengan Budiati mencoba menggali lebih jauh bagaimana pergulatan dan perjalanan seorang aktivis membangun jembatan antara *state* dan *civil society* serta pada saat yang sama harus mencoba membangun suatu koalisi dengan komunitas LSM/CSO untuk menopang keberlanjutan program advokasi. Sedangkan wawancara dengan Kutut Suwondo mencoba menelusuri bagaimana pergeseran nuansa infrastruktur politik dari teritori desa ke arena teritori kota. Kajian yang dikembangkan dalam wawancara ini memang secara khusus mengambil sosok dinamika politik Kota Salatiga.

Dalam edisi Jurnal *Renai* kali ini, tiga penulis juga menyumbangkan tulisannya untuk mempublikasikan artikel lepas. *Pertama*, tulisan Haryani Saptaningtyas, yang berjudul *Pasar Tradisional dan Politik – Perilaku dalam Strategi Pencarian Dukungan Suara oleh Amien Rais*. Tulisan ini mencoba memetakan sebuah kasak-kusuk politik seorang Amien Rais di arena pasar tradisional. Penulis mengemukakan bahwa kunjungan Amien Rais bukan kunjungan biasa seorang konsumtif tetapi tidak bisa dilepaskan dengan kepentingan politik menjelang Pemilu 2004. *Kedua*, tulisan yang dikembangkan oleh Singgih Nugroho, *Pak Tono: Tukang Jembatan bagi Salatiga*. Penulis mencoba mengungkapkan bahwa seorang Th Sumartono bagi Salatiga memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjembatani dialektika antara Kristen dan Islam. Upaya Th Sumartono ini sendiri kemudian juga tidak bisa dilepaskan dari label usaha mempromosikan teologi sinkretisme. *Dan ketiga*, tulisan yang disajikan oleh Gunawan Wiradi dengan judul, *Memperkuat Posisi Masyarakat dalam Pendayagunaan Sumber Daya Alam*. Tulisan ini hendak mengantarkan sidang pembaca kepada konstruksi sejarah reforma agraria bergulir dalam peradaban manusia. Tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dan *civil society* menjadi sangat kental dibahas. Penulis juga mengenalkan pemaknaan politik agraria dari aspek semiotika. Selain itu, penulis mencoba memperiodisasikan sejarah perjalanan politik agraria di Indonesia sembari juga mencoba bagaimana seharusnya posisi rakyat yang begitu lemah harus diberdayakan. Pemberdayaan yang dimaksud khususnya ditujukan kepada aras intelektual, elite politik, dan komunitas basis.

Sebagai sebuah informasi yang pantas dicermati oleh sidang pembaca, dua timbangan buku yang mencoba mengupas bagaimana kinerja kepala desa pada era Orde Baru dibahas oleh G. J.

*Kepemimpinan Lokal.* Timbangan buku lainnya mencoba menengahkan bagaimana sejumlah pola gerakan sosial bahkan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang berasal dari atas atau dari pusat. Dengan membedah buku suntingan N. Kusuma dan Fitria Agustina, *Gelombang Perlawanan Rakyat – kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, ulasan ini dipandang akan memberikan pengayaan kepada komunitas aktivis LSM/*Civil Society Organization* atau bahkan komunitas *civil society* sendiri.

Dalam rubrik jaringan pemerhati politik lokal, redaksi menyajikan informasi tentang rencana Seminar Internasional ke-5 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2004. Informasi ini juga sekaligus merupakan undangan bagi para pihak pemerhati dinamika politik lokal.

Akhirnya, dengan sajian artikel dan kelengkapan tulisan di atas, kiranya dapat memperkaya wawasan sidang pembaca dan kemungkinan untuk lebih memperkembangkannya lagi dalam praksis sehari. Selamat membaca. ■

